



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA  
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

25 FEB 2020

Jakarta, 14 Februari 2020

Nomor : 02/PANSEL.JPT/KEMENKO/MARVES/II/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Segera  
Perihal : Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kepada Yth:

1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/  
Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
2. Para Sekretaris Daerah Provinsi.

di-

Tempat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan mengadakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menginformasikan kepada jajaran Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah Bapak/Ibu/Saudara/i. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat dan diunduh pada website [www.maritim.go.id/seleksi-jpt-madya-2020](http://www.maritim.go.id/seleksi-jpt-madya-2020).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Seleksi  
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  
dan Investasi,



Agung Kuswandono

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA  
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

25 FEB 2020

Jakarta, 14 Februari 2020

Nomor : 02/PANSEL.JPT/KEMENKO/MARVES/II/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Segera  
Perihal : Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kepada Yth:

1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/  
Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
2. Para Sekretaris Daerah Provinsi.

di-

Tempat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan mengadakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menginformasikan kepada jajaran Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah Bapak/Ibu/Saudara/i. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat dan diunduh pada website [www.maritim.go.id/seleksi-jpt-madya-2020](http://www.maritim.go.id/seleksi-jpt-madya-2020).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Seleksi  
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  
dan Investasi,



Agung Kuswandono

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran Surat

Nomor : 02/PANSEL-JPT/KEMENKO/MARVE/IV/2020

Tanggal :

### DAFTAR PENERIMA PENGUMUMAN

Sekretaris Kementerian Koordinator/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
26. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas);
27. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
28. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
29. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
30. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
31. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
32. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

Sekretaris Jenderal lembaga Tinggi Negara

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

## Sekretaris Jenderal Lembaga Negara

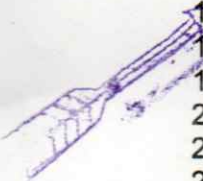
1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

## Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG);
3. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN);
4. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla);
5. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN);
6. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
7. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
8. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
9. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN);
10. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
11. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
12. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
13. Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
14. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN);
15. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
16. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
17. Sekretaris Utama Badan Pertahanan Nasional (BPN);
18. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS);
19. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas);
20. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN);
21. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
22. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN);
23. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
24. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
25. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS);
26. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
27. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG);
28. Sekretaris Utama Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS);

## Sekretaris Daerah Provinsi

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta;

- 
15. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
  16. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
  17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
  18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
  24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
  26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  29. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
  30. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
  31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
  32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
  33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
  34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.